

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam menjatuhkan pidana Hakim mempertimbangkan banyak hal. sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat di pidana penjara dengan ketentuan hukum paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa di persidangan bersikap sopan
 - Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
 - Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
2. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah Hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi yang berbelit-belit, keterangan terdakwa, mengajukan barang bukti di persidangan, dan penundaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan

baik korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnu Broto *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta
- Agung Wahjono, 1993, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta,
- Bambang Sutyoso, 2005, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C. S. T. Kansil, 2005, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* , Jakarta: Pradnya Paramita,
- Darwan prist, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Kartono, Kartini. 1992, *Phatologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Perss, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika aditama, Bandung
- Mardjono Reksodiputro. 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, citra Aditya Bakti, Bandung
- Prof. Moeljatno, S.H., 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara

Setya wahyudi, 2011, *implementasi ide diversi dalam pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mammuji. 1990, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sri Widoyati soeko. *Anak dan Wanita dalam hukum*, Jakarta 1983

Tim Fokusmedia, 2013, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *hukum pidana anak*, Bandung, Refika Aditama

website

<http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>, diakses Selasa, 12 Agustus 2014.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana